

MATARAM RAIH WTP KE -11 DARI BPK PERWAKILAN NTB



Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana (tengah) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Suprawadi (kiri). Kota Mataram mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, di Mataram, Selasa (27/5/2025). ANTARA/HO-Kominfo Mataram

Mataram (ANTARA) – Pemerintah Kota Mataram, kembali meraih prestasi membanggakan dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB Suprawadi, kepada Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana dalam keterangannya di Mataram, Rabu.

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan, capaian itu menandai keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut sejak pertama kali diraih.

"Prestasi itu, mencerminkan kesungguhan Pemerintah Kota Mataram dalam menjaga kualitas dan keandalan penyusunan laporan keuangan daerah," katanya.

Dikatakan, opini WTP diberikan sebagai bentuk pengakuan atas tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar akuntansi pemerintahan, serta penerapan sistem pengendalian internal yang berjalan secara konsisten dan efektif.

Lebih dari sekadar pencapaian administratif, keberhasilan meraih opini WTP ke-11 menjadi indikator penting terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pembangunan di Kota Mataram.

Capaian tersebut, tambah wali kota, sekaligus memperkuat posisi Pemerintah Kota Mataram dalam upaya membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas sebagai fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sementara sebagai bentuk tanggung jawab, seluruh rekomendasi yang tercantum dalam hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti secara sistematis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Berbagai catatan dan rekomendasi dari BPK, segera kami tindaklanjuti," katanya.